

**SOSIALISASI GERAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROPOLITAN PROGRAM TO THE FARMER
THE SOCIALISATION AGROPOLITAN MOVEMENT AREA
DEVELOPMENT PROGRAM TO THE FARMER**

Yanuarti Hapsari¹⁾, Arip Wijianto²⁾, Sutarto³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian,
Universitas Sebelas Maret

Abstract

The aimed of this research is to know how the socialization Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) Program, knowing constraint delayed on socialization Movement Development Program of Agropolitan District (SMAD), and knowing the way of socialization Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) Program Regency of Boyolali. The method are used is kualitative with descriptive approach. Location of this research used purposive ways that on Regency of Boyolali. From Regency of Boyolali was chosen two subdistrict, that is subdistrict of Ampel and Boyolali. The informan are used with purposive ways and snowball sampling. The sources data its come from the informan, place and activities and also document/archieve. Whereas the technique to collected data had done with interview, observation, and content analysis. To measure of data used triangulation data (sources). The data was analysed by using reduction data, saw data, and verification. The result of this research showing that The Socialization Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) Program had done with elucidation/companionship with group farmer/GAPOKTAN, PPL, and official related, training, and contiguous. Constraint that fight are amount personil in concerned stint, presence either one staf section Agribisnis mutation, the farmer not all known about the GPKA program, cost limit for activity GPKA program, the farmer activity, and the farmer whole lot have same view and attitude about GPKA. The way used are coordinating amount personil in concerned, giving suggestion to tow removal the staf involved, the change information with farmer other, make proposal for GPKA Program, and coordination across sector intensived and contiguous.

Keyword: Socialisation, agropolitan, movement area development program, to the farmer

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA), mengetahui kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA), dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* (sengaja) yaitu di Kabupaten Boyolali. Dari Kabupaten Boyolali dipilih 2

kecamatan yaitu Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* (sengaja) dan *snowball sampling* (teknik bola salju). Jenis sumber data yang digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa/aktivitas, serta sumber tertulis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan *content analysis*. Untuk mengukur validitas data menggunakan triangulasi data (sumber). Analisis data yang digunakan ialah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Program GPKA dilakukan melalui penyuluhan/pertemuan antara kelompok tani/GAPOKTAN, PPL, dan dinas terkait, pelatihan, dan pendampingan. Kendala yang dihadapi yaitu jumlah personil yang dilibatkan terbatas, adanya mutasi salah satu staf Seksi Agribisnis, tidak semua petani mengetahui tentang Program GPKA, keterbatasan dana untuk kegiatan program GPKA, aktivitas petani, dan petani belum seluruhnya memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap GPKA. Upaya yang dilakukan adalah mengkoordinasi jumlah personil yang akan dilibatkan, membuat proposal pelaksanaan GPKA, dan memberi masukan untuk menunda kepindahan staf bersangkutan, bertukar informasi kepada petani lain, dan mengintensifkan koordinasi lintas sektor dan pendampingan.

Kata kunci: Sosialisasi, agropolitan, pengembangan kawasan, to farmer's

PENDAHULUAN

Basis pembangunan pertanian adalah pembangunan pedesaan. Karena kawasan pedesaan merupakan daerah tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2006, diketahui kurang lebih 54% penduduk Indonesia bermukim di pedesaan (Rustiadi dan Sugimin Pranoto, 2007). Oleh karena itu, pembangunan pedesaan perlu lebih dimantapkan agar memiliki ketahanan yang lebih kuat. Mengingat pentingnya fungsi daerah pedesaan terutama dalam hal penyedia bahan pangan untuk penduduk, penyedia tenaga kerja untuk pembangunan, penyedia bahan baku untuk industri dan penghasil komoditas untuk diekspor ke luar negeri

(Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, 2008).

Menyikapi berbagai tantangan dan ancaman dalam pengembangan bidang pertanian di pedesaan maka diperlukan terobosan program yang melibatkan berbagai pihak yang perlu dilakukan secara terarah dan terkoordinasi. Salah satu program tersebut adalah Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA).

Konsep agropolitan pada dasarnya adalah sebuah gerakan untuk kembali membangun desa. Desa yang baik idealnya harus bisa menjadi suatu tempat yang nyaman, aman dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Konsep agropolitan ini basisnya pada membangun fungsi kota pertanian dalam artian luas.

Dimana pertanian itu tidak dilihat dari sisi bercocok tanam dan mencangkul saja (Rustiadi, 2006). Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi di kawasan agropolitan.

Program GPKA ini dilaksanakan di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Cepogo, Kecamatan Ampel, Kecamatan Selo, dan Kecamatan Boyolali atau biasa disingkat dengan nama "GOASEBO". Program tersebut sudah ada sejak tahun 2003 dan sempat fakum pada tahun 2006-2007 dan pada tahun 2008 mulai dikembangkan lagi. Untuk mengatasi kefakuman tersebut maka perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Proses sosialisasi ini perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Kabupaten Boyolali bermata pencaharian sebagai petani. Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan,

pelatihan, maupun pendampingan kepada petani.

METODE PENELITIAN

Disain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (menguraikan sifat/karakteristik dari suatu fenomena tertentu, mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan/objek yang diteliti) (Hasan, 2002). Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* yaitu Kabupaten Boyolali karena Program GPKA sebagai salah satu instrument Program Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang ditetapkan sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Boyolali tahun 2006–2010.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu *purposive sampling* (sengaja) dan *snowball sampling* (teknik bola salju). Jenis sumber data yang digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa/aktivitas, serta sumber tertulis (dokumen/arsip) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, serta mengkaji dokumen

dan arsip (*content analysis*). Validitas data dalam penelitian ini berupa triangulasi data (sumber) dan *review* informan kunci dengan menggunakan teknik analisis interaktif (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA) di Kabupaten Boyolali

Rustiadi dan Sugimin Pranoto (2007) mengemukakan bahwa konsep pengembangan kawasan agropolitan muncul dari permasalahan adanya ketimpangan wilayah antara kota dan pedesaan. Kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi sedangkan pedesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Boyolali telah berlangsung sejak tahun 2003. Pada awal pembentukannya berupa program “rintisan agropolitan” yang dilaksanakan di empat kecamatan (Cepogo, Ampel, Selo, dan Boyolali) atau disebut dengan “GPKA GOASEBO”. Dalam hal ini Kecamatan Ampel dipilih sebagai kota tani utama karena wilayahnya lebih luas (8.468,06 Ha) dibanding-

kan dengan empat kecamatan yang lain yang termasuk dalam GOASEBO dan telah memiliki BPP Model. Kecamatan Ampel juga merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki jumlah kelompok tani terbanyak di Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kecamatan Boyolali dipilih sebagai daerah penyangga (*hinterland*) karena wilayahnya belum berkembang seperti Kecamatan Ampel. Luas wilayahnya hanya 2.625,10 Ha dan lokasi BPP masih bergabung dengan kantor kecamatan (Kantor Ketahanan Pangan Boyolali, 2008).

Program GPKA ini merupakan program dari pemerintah pusat melalui Departemen Pertanian yang memberi mandat kepada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DISPERTANBUNHUT) di masing-masing kabupaten yang ada di Indonesia, termasuk Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan Program GPKA. DISPERTANBUNHUT ber-samasama BAPPEDA kemudian melakukan perencanaan terhadap Program GPKA tersebut. Setelah perencanaan matang baru kemudian di limpahkan kepada Kantor Ketahanan Pangan (KKP). Untuk mempermudah sosialisasi program tersebut, KKP bekerja sama dengan BPP kemudian menyampaikannya kepada

petani di masing-masing wilayah yang bersangkutan. Adapun tim Pembina Program GPKA dapat dilihat pada Tabel 1.

Pentahapan pengembangan kawasan agropolitan dimulai dengan menyusun *Master Plan* terlebih dahulu. *Master Plan* berisi konsep rencana kawasan agropolitan yang terpilih (misalnya mengenai: kebijakan penetapan kawasan, kajian teori tentang pengembangan kawasan, dan penetapan sarana prasarana

pada kawasan yang terpilih). Tahap berikutnya adalah penyusunan RPJM (Rencana Program Jangka Menengah), yang berisi rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah. Setelah penyusunan RPJM, tahap terakhir yang ditempuh dalam pengembangan kawasan agropolitan ialah pembentukan DED (*Detail Engineering Design*). DED merupakan disain rincian teknis atau teknis pelaksanaan dari program tersebut.

Tabel 1 Susunan Tim Pembina Program GPKA di Kab. Boyolali Tahun 2008

No	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
TINGKAT KABUPATEN		
1.	Bupati Boyolali	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Boyolali	Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boyolali	Pengarah
4.	Asisten Admin Pembangunan Sekda Kab. Boyolali	Ketua
5.	Kepala Bappeda Kab. Boyolali	Wakil Ketua
6.	Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Boyolali	Sekretaris
7.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Boyolali	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Boyolali	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Pertambangan dan Kebersihan Kab. Boyolali	Anggota
10.	Kadin Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Boyolali	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kab. Boyolali	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Boyolali	Anggota
13.	Kepala Dispersertanbunhut Kab. Boyolali	Anggota
14.	Kadin Perternakan dan Perikanan Kab. Boyolali	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Boyolali	Anggota
16.	Kepala Badan Lingk Hidup Kab. Boyolali	Anggota
17.	Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kab. Boyolali	Anggota
TINGKAT KECAMATAN		
1.	Camat	Ketua
2.	Kepala UPT DISPERTANBUNHUT yang berwilayah kerja di kecamatan bersangkutan	Sekretaris
3.	Kepala UPT Dinas Peternakan dan Perikanan yang berwilayah kerja di kec. bersangkutan	Anggota
4.	Kepala UPT DPUPPK yang berwilayah kerja di kecamatan bersangkutan	Anggota

Sumber : Surat Keputusan Bupati Boyolali

Sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA)

Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel

Pelaksanaan sosialisasi Program GPKA meliputi penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan.

1. Penyuluhan

Untuk pertama kalinya kegiatan penyuluhan tentang Program GPKA dilaksanakan di BPP Ampel dengan sasaran seluruh kelompok tani yang tergolong dalam Program GPKA. Sebagai nara sumbernya adalah dari DISPER TANBUNHUT yang kebetulan ditunjuk sebagai pihak konsultan dan Kantor Ketahanan Pangan serta mengundang kepala desa masing-masing kecamatan yang tergolong dalam GOASEBO, camat masing-masing kecamatan yang tergolong dalam GOASEBO, dan perwakilan dari pelaku agribisnis (pedagang).

Materi yang pertama kali disampaikan kepada sasaran adalah perkenalan dan penjelasan terlebih dahulu tentang Program GPKA. Hal ini sifatnya *permission* atau meminta ijin kepada warga setempat dengan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan program, misalnya

tujuan, lingkup kegiatan, dan manfaat bagi warga setempat.

Dalam kegiatan penyuluhan tersebut konsultan menggunakan media bantu berupa laptop, LCD, serta dilengkapi dengan peta ukuran besar selain itu konsultan juga membagikan kuisisioner yang berisi tentang permintaan usulan-usulan program pembangunan sarana dan prasarana kawasan agropolitan. Diharapkan dari kuisisioner tersebut mendapatkan masukan/usulan yang sebanyak-banyaknya mengenai kebutuhan sarana dan prasarana yang belum tersedia atau memerlukan perbaikan maupun perawatan.

Materi penyuluhan selanjutnya ialah penjelasan tentang pemberdayaan yang disampaikan oleh Bapak Tri Hartoyo (perwakilan dari Kantor Ketahanan Pangan). Pemberdayaan merupakan kegiatan identifikasi terhadap tindakan pemberdayaan yang perlu dilaksanakan untuk menumbuhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya adalah penentuan visi dan misinya. Selain itu juga dilakukan diskusi/tukar informasi guna mendapatkan masukan/ide tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, serta

dilakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat untuk memperoleh umpan balik/tanggapan.

Tahun 2008 kegiatan sosialisasi ini mulai dilaksanakan kembali guna mengingatkan para petani tentang Program GPKA karena pada tahun 2006-2007 sempat mengalami kevakuman. Pelaksananya masih sama yaitu melalui penyuluhan. Materi penyuluhan yang disampaikan mengenai revitalisasi kelompok tani. Revitalisasi kelompok tani merupakan proses/upaya untuk mengaktifkan kembali kelompok tani, yang sebelumnya masih pasif diharapkan agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tani. Materi yang diberikan pada saat kegiatan tersebut antara lain tentang peningkatan kemampuan kelompok tani, wilayah kerja, kepengurusan dan keanggotaannya.

Pada kegiatan penyuluhan ini dinas terkait juga berencana untuk memberikan bantuan berupa bibit/benih buah-buahan (salak pondoh, durian, pisang, dan lain-lain) dan sayuran (jagung, kacang tanah, dan lain-lain), bantuan obat-obatan, alsintan, serta alat pengolahan pasca panen. Banyaknya bantuan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok tani

yang akan diserahkan bersamaan dengan pelatihan secara bergilir.

2. Pelatihan dan pendampingan

Kegiatan pelatihan ini mulai dilakukan pada tahun 2008 setelah wilayah yang bersangkutan mendapat penyuluhan dari dinas terkait. Pelatihan yang dilakukan disini antara lain pelatihan penguatan modal kelompok, pelatihan pengolahan pasca panen. Sedangkan pendampingan dilakukan bersamaan dengan pelatihan.

Pelatihan Penguatan Kelembagaan, materi yang dipelajari mengenai ciri, fungsi, dasar penumbuhan dan pengembangan kelompok tani, kemitraan, serta asosiasi petani. Sebagai pemateri / nara sumber yaitu dari Kantor Ketahanan Pangan dan UPT DISPERTANBUNHUT. Adapun alat Bantu yang digunakan adalah LCD, *note book*, dan ATK (Alat Tulis Kantor).

Pelatihan pengolahan pasca panen, materi yang disampaikan mengenai pengolahan hasil pertanian, teori dan praktek pembuatan kripik dari buah nangka. Sebagai pemateri/nara sumber berasal dari Kantor Ketahanan Pangan dan SMKN 1 Mojosongo, Boyolali.

Alat bantu yang digunakan adalah LCD, *note book*, ATK, dan alat mesin pengolahan hasil pertanian. Pemakaian alat mesin tersebut secara bergantian yakni memberi kesempatan kepada semua warga desa yang ingin mengembangkan usaha, baik individu maupun kelompok. Peminjaman ini tanpa dipungut biaya dan untuk sementara waktu diserahkan kepada Kepala Desa Candi. Apabila kerusakannya tidak terlalu parah maka hanya diperbaiki sendiri agar tidak menghabiskan biaya yang banyak atau menghubungi teknisi untuk memperbaikinya apabila memang diperlukan (Kantor Ketahanan Pangan Boyolali, 2008).

Hasil Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel

Secara teknis: adanya umpan balik atau respon dari peserta sosialisasi khususnya petani terhadap permasalahan yang terkait dengan Program GPKA. Secara psikologis: pemahaman petani terhadap sosialisasi Program GPKA dapat dikatakan baik. Hal ini berarti bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan dapat menambah pengetahuan petani. Dengan bertambahnya pengetahuan petani maka dapat membantu

terlaksananya Program GPKA. Secara kuantitas: jumlah kelompok tani yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Program GPKA sebanyak 200 kelompok tani. Hal ini membuktikan bahwa hampir seluruh petani aktif dalam melaksanakan GPKA.

Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Boyolali

Proses pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Boyolali sama dengan sosialisasi di Kecamatan Ampel, yaitu meliputi penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan.

1. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan ini merupakan kelanjutan dari penyuluhan sebelumnya yang diselenggarakan di BPP Ampel melalui koordinasi dengan perangkat kecamatan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan agribisnis. Akan tetapi penyuluhan kali ini dilaksanakan di Balai Desa Kecamatan Boyolali. Sebagai nara sumbernya adalah dari DISPER TANBUNHUT dan Kantor Ketahanan Pangan serta mengundang kepala desa Kecamatan Boyolali, dan Camat Boyolali.

Media Bantu yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan adalah

white bord, spidol, *microphone*, tape, dan ATK. Materi yang disampaikan menyangkut tentang pembinaan kelompok tani. Materi pembinaan kelompok tani ini tidak cukup hanya dengan diskusi saja tetapi ditindak lanjuti dengan peran aktif dari para anggota kelompok tani.

Setelah materi tersebut selesai dilanjutkan dengan rapat koordinasi. Kegiatan tersebut membahas tentang rencana kerja maupun hal teknis lapangan yang akan dilakukan kedepannya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terkoordinasinya pengembangan kawasan agropolitan, baik fisik maupun non fisik, koordinasi vertikal maupun horizontal. Koordinasi vertikal misalnya koordinasi dengan dinas di tingkat atas (kabupaten) sedangkan koordinasi horizontal misalnya koordinasi dengan tingkat yang sama (sesama petani).

Pada kegiatan penyuluhan ini dinas terkait juga berencana untuk memberikan bantuan berupa bibit / benih buah-buahan (pisang, kelapa, dan lain-lain) dan sayuran (jagung, kacang tanah, dan lain-lain), bantuan obat-obatan, alsintan, serta alat pengolahan pasca panen. Banyaknya bantuan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-

masing kelompok tani yang akan diserahkan bersamaan dengan pelatihan secara bergilir.

Sayangnya respon peserta dalam kegiatan penyuluhan ini kurang baik karena peserta tidak begitu antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan. Beberapa peserta yang hadir tidak begitu mengetahui tentang Program GPKA. Menurut peserta yang penting Program GPKA tersebut diharapkan dapat membantu mengembangkan usahatani.

2. Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan merupakan salah satu usaha tindak lanjut yang dilaksanakan setelah wilayah yang bersangkutan mendapatkan penyuluhan. Sedangkan pendampingan dilakukan bersamaan dengan pelatihan. Alat bantu yang digunakan yaitu alat perajang criping/ubi kayu. Sasaran pelatihan ini adalah dikhususnya pada wanita, baik wanita tani maupun ibu rumah tangga.

Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan usaha pengolahan hasil pertanian. Dalam hal ini hasil pertanian yang akan diolah adalah criping/ubi kayu yaitu diolah menjadi kripik. Para peserta pelatihan mempraktekkan sendiri apa yang diperintahkan oleh demonstrator

sehingga dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang ia miliki. Yang ditunjuk sebagai demonstrator dalam pelatihan ini adalah ibu Sukarni selaku PPL Boyolali.

Hasil Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Boyolali

Secara teknis: kurangnya umpan balik/respon dari peserta sosialisasi. Peserta cenderung bersikap pasif, tidak begitu antusias dalam mengikuti sosialisasi karena pada saat diadakan sosialisasi yang pertama kali, ada yang tidak hadir sehingga informasi yang diperoleh kurang. Secara psikologis: petani kurang memahami tentang sosialisasi Program GPKA. Akan tetapi kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan petani. Secara kuantitas: jumlah kelompok tani yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Program GPKA sebanyak 50 kelompok tani.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (GPKA)

Kendala Sosialisasi di Kecamatan Ampel

1. Terbatasnya jumlah personil yang dilibatkan dalam program.

Dalam hal ini personil/tim yang ditunjuk hanya berasal dari

tingkat kabupaten dan kecamatan saja. Seharusnya tingkat daerah (seperti PPL) juga dilibatkan dalam perencanaan program karena tingkat daerah berperan sebagai penyalur informasi antara dinas terkait dengan petani dan secara tidak langsung juga sebagai pelaksana dari Program GPKA sehingga perlu mengetahui tentang program tersebut.

2. Ketersediaan Dana untuk sosialisasi Program GPKA

Hal ini dianggap penting karena jenis kegiatan yang termasuk dalam Program GPKA tidaklah sedikit sehingga membutuhkan dana dalam jumlah banyak. Misalnya dana untuk kegiatan penyuluhan dalam rangka sosialisasi Program GPKA. Untuk mengadakan penyuluhan pasti mengundang kelompok tani dan dinas terkait serta membutuhkan alat tulis kantor, LCD, leaflet, konsumsi, dan lain-lain. Apabila dana yang diberikan kurang maka petugas terkait terpaksa menggunakan dana mereka sendiri.

3. Aktivitas petani

Aktivitas para petani selaku sasaran dalam Program GPKA terkadang dapat menjadikan suatu kendala karena aktivitas dari tiap-tiap petani berbeda-beda dan

terkadang tidak terduga sehingga pertemuan antara petani dengan dinas terkait perlu dijadwalkan terlebih dahulu. Penetapan waktu pertemuan sebaiknya disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara petani dengan dinas terkait.

Kendala Sosialisasi di Kecamatan Boyolali

1. Adanya mutasi dan penggantian salah satu staf Seksi Agribisnis.

Adanya mutasi ini terjadi pada saat Kasi Agribisnis sedang mengikuti Diklat Pim IV di Donohudan Kecamatan Ngemplak. Padahal pada Program GPKA sedang berjalan yaitu pada tahap pelaksanaan kegiatan fisik (pemberian bantuan bibit/benih dan pemberian bantuan obat-obatan/pupuk kepada petani) dan non fisik (revitalisasi kelompok tani dan koordinasi dengan dinas terkait tentang Program GPKA).

Meskipun posisi staf yang di mutasi telah diganti oleh staf yang baru namun staf yang baru tersebut kurang memahami tentang Program GPKA sehingga perkembangan dari Program GPKA sempat terhambat / fakum. Adanya mutasi dan penggan-

tian staf ini ditangani oleh TU di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali.

2. Tidak semua petani mengetahui tentang Program GPKA.

Hal ini dikarenakan pada saat diadakan penyuluhan tentang GPKA, petani ada yang tidak hadir karena memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Disisi lain meskipun petani hadir tetapi mereka hanya sekedar mendengarkan saja tanpa ada respon/tindakan pada diri mereka.

3. Petani belum seluruhnya memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap GPKA.

Menurut Sunarsih dan Ashari (2004) kemampuan anggota masyarakat dalam menghargai tata nilai "maju" dapat dianggap sebagai salah satu ciri penting tingginya kualitas SDM. Kualitas SDM ini akan mempengaruhi sikap dan pandangan petani terhadap hasil sosialisasi tentang Program GPKA yang mereka terima. Apabila sikap dan pandangan petani tidak sama maka sulit untuk mengajak petani agar mau melaksanakan apa yang disuluhkan oleh PPL.

**Upaya Untuk Mengatasi Kendala
Dalam Sosialisasi Program Gerakan
Pengembang-an Kawasan
Agropolitan (GPKA)**

**Upaya yang dilakukan di Kecamatan
Ampel**

1. Mengkoordinasikan lagi jumlah personil yang akan dilibatkan.

Jumlah personil yang dilibatkan diusahakan benar-benar sanggup dan mampu untuk melaksanakan Program GPKA agar program tersebut berjalan lancar sesuai keinginan bersama. Bila perlu menambah jumlah PPL karena jumlah PPL tidak sebanding dengan jumlah kelompok tani yang ada di sana. Jumlah PPL hanya 11 orang sedangkan jumlah kelompok tani 230 kelompok.

2. Membuat proposal pelaksanaan Program GPKA

Upaya yang ditempuh oleh dinas terkait dengan cara membuat proposal pelaksanaan Program GPKA diharapkan mendapat persetujuan dari pusat. Di dalam proposal tersebut berisi rincian kegiatan dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan GPKA. Apabila mendapat persetujuan dari tingkat pusat maka dapat mengurangi masalah ketersediaan dana.

**Upaya yang dilakukan di Kecamatan
Boyolali**

Memberi masukan kepada pimpinan agar staf yang bersangkutan ditunda kepindahannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Upaya tersebut meskipun pernah ditempuh tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimum. Staf tersebut tetap harus pindah karena sudah menjadi keputusan bersama dan mau tidak mau harus menerimanya. Bertukar informasi dengan petani lain apabila ada informasi baru terutama kepada petani yang tidak hadir pada saat penyuluhan.

Hal ini perlu dilakukan karena agar semua anggota kelompok tani mengetahui informasi terkait tentang Program GPKA yang dilaksanakan di daerahnya. Apabila informasi tersebut kurang lengkap, petani dapat menanyakan langsung kepada dinas terkait/ berkonsultasi dengan PPL. Perlu diingat bahwa yang terpenting adalah pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh petani.

Menurut Brooks (1971) Jika beberapa orang menerima pesan yang disampaikan berarti komunikasi berjalan dengan baik, namun jika pesan tidak mampu diterima oleh orang lain maka dapat dikatakan

bahwa komunikasi berjalan kurang baik.

Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dan pendampingan

Koordinasi lintas sektor dan pendampingan perlu lebih diintensifkan agar petani memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap Program GPKA. Dengan begitu para petani akan bersama-sama mensukseskan Program GPKA karena keberhasilan dari program ini berada ditangan dinas terkait dan para petani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel dan Boyolali dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan.
2. Kegiatan sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel dan Boyolali ternyata dapat menambah pengetahuan dan pemahaman petani terkait tentang usahatani dan mendapat respon/umpan balik dari para petani.
3. Alat/media bantu yang dipergunakan dalam mensosialisasikan Program GPKA antara lain LCD, *note book*, ATK, laptop, peta, dan leaflet.
4. Kendala yang dihadapi dalam sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel antara lain terbatasnya jumlah personil yang dilibatkan, ketersediaan dana untuk sosialisasi kegiatan Program GPKA, dan aktivitas petani.
5. Kendala yang dihadapi dalam sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Boyolali adalah adanya mutasi salah satu staf Seksi Agribisnis pada saat Kasi Agribisnis sedang mengikuti Diklat Pim IV, tidak semua petani mengetahui tentang Program GPKA karena pada saat diadakan penyuluhan tentang GPKA petani ada yang tidak hadir, dan petani belum seluruhnya memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap GPKA.
6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Ampel adalah mengkoordinasikan lagi jumlah personil yang akan dilibatkan, membuat proposal pelaksanaan Program GPKA.
7. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam sosialisasi Program GPKA di Kecamatan Boyolali adalah memberi masukan kepada pimpinan agar staf yang

bersangkutan ditunda kepin-dahannya, bertukar informasi kepada petani lain apabila ada informasi baru terutama kepada petani yang tidak hadir pada saat penyuluhan, dan mengintensifkan koordinasi lintas sektor dan pen-dampingan.

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah bagi dinas terkait, perlu menambah jumlah personil yang akan dilibatkan dalam mensosialisasikan Program GPKA, Bagi petani, diharapkan selalu aktif dalam mengikuti penyuluhan dan berkonsultasi dengan penyuluh yang ada di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brooks, William D. 1971. *Speech Comunication*. Brown Com-pany Publishers. The United States of America.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2006. *Rencana Program Jangka Menengah: Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabu-paten Boyolali*. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Boyolali.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali. 2008. *Agropolitan*. Boyolali.
- Rivai, Deddy Effendi. 2003. Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai Pendekatan Wilayah dan Pember-dayaan Masyarakat Perta-nian. Disampaikan dalam *Makalah Pengantar Falsa-fah Sains (PPS702) Program Pasca Sarjana/ S3*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rustiadi, Ernan. 2006. Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan. [http:// Jakar talitbang. go. id/ klinikagro-bisnis](http://Jakartalitbang.go.id/klinikagro-bisnis). Diakses tanggal 18 September 2008.
- _____ dan Sugimin Pranoto. 2007. *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*. Crest-pent Press. Bogor.
- Sajogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yaya-san Agroekonomika. Yogya-karta.
- Sunarsih dan Ashari. 2004. *Aspek Kelembagaan dan Aplikasi-nya dalam Pembangunan Pertanian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosek Pertanian dan Badan Litbangtan. Bogor.

Sosialisasi, agropolitan,, Hapsari, Wijianto, Sutarto

Yusroni. 2005. *Strategi Sosialisasi dan Pelaksanaan Program Sosialisasi Berbagai Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar pada*

Pasar Tradisional Di Kota Surakarta. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.